

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Nuzul, "Pengantar Ilmu Hukum", (Cet. I; Indonesia;phinatama Media, 2017), h 83.
- Andi Nuzul, "Pengantar Ilmu Hukum" , h 83-86.
- Teguh Prasetyo, "Filsafat Teori, dan Ilmu Hukum", (Cet. IV; Jakarta, PT Raja Grafino Persada, 2012.
- Aria S. Hutagalung, 2005, "Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah", LPHI, Jakarta.
- Bachsan Mustafa, "Hukum Agraria Dalam Perspektif", (Bandung: Remaja Karya, 1988).
- Bachsan Nustafa, "Hukum Agraria Dalam Perspektif", (Bandung : Remaja Karya), h 22.
- Susanti Adi Nugroho, SH.,MH. "Manfaat Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa". Kencana/Prenada.
- Hambali Thalib, Prof, Dr, SH, M.H, Sanksi Pemidanaan dalam Konflik Pertanahan, Kencana Predana Media Group 2009, Jakarta, h 188.
- Irwan Surojo, 2006. "Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia". Surakarta, Arseola.
- Maria SW Sumardjono, Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, Kompas, Gramedia, Jakarta, 2008, h 3.
- Sumardjono, Nurhasan Ismail, Isharyanto, Op.cit, h 2
- Maria S.W Sumarjono, Nur Hasan Ismail, Isharyanto.2008. "Mediasi Sengketa Tanah". Kompas : Jakarta.
- Maria Sumardjono. 2009. "Tanah Dalam Prespektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya". Kompas Jakarta. h 112.
- Moh. Bakri, 2007, "Hak Menguasai Tanah Oleh Negara", Jakarta, Citra Media, h 47.
- Mohammad Machfudh Zarqoni, 2014. "*Hak Atas Tanah*". Jakarta: Pretasi Pusaka, h 63.

Mukmin Zakie, Kewenangan dalam Pengadaan Tanah, Buku Litera, Yogyakarta, 2013, h 6.

Roestandi Adiwilaga, "Hukum Agraria Indonesia", (Bandung : Masa Baru), h 75.

Rusmadi Murad, "Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah" (Bandung: Alumni/1999, h 24

Sujud Margono 2004 ADR Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum, Ghalia, Indonesia, Bojongkerta. h 35.

Sujud Margono. 2004. ADR dan Arbitrase. "Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum". Ghalia Indonesia: Bojongkerta. h 59.

Sujud Margono ,2004. ADR dan Arbitrase "Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum" ,Ghalia Indonesia: Bojongkerta. h 63.

Tim Benteng Pustaka, 2010. "Kamus Saku Bahasa Indonesia". Edisi Pertama, Yogyakarta: Benteng Pustaka, h. 69.

Urip Santoso, 2012, "Hukum Agraria", Jakarta, Kencana Prendana Media Group, h 92.

-----, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM.

-----, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.

-----, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional.

-----, Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Tentang Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten dan Kota

-----, Peraturan Kepala Pertanahan Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan, Pengkajian, dan Penanganan Kasus Tanah.

-----, Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003, Tentang Dalam Rangka Mewujudkan Konsep